

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai unsur pelaksana dalam urusan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, yang mana sudah sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yaitu dengan melaksanakan tugasnya yang berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
2. Peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin dapat dikatakan memegang peranan yang penting dilihat dari keterlibatannya dalam mengatasi urusan sosial, walaupun dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sudah melakukan tugas dengan baik sesuai dengan Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, walaupun masih belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa program yang disalurkan masih belum dilaksanakan secara merata atau kurang tepat sasaran, hal ini disebabkan kurang maksimal dalam proses verifikasi pada data penerima bantuan juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran, faktor sumber daya manusia.
3. Peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin menurut perspektif *fiqh siyāsah* sesuai dengan *fiqh siyāsah māliyyah*, artinya sudah memenuhi hak kewajiban dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi berdasarkan *siyāsah māliyyah*, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai penyelenggara pemerintahan yang amanah dan adil sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di lingkungan Kabupaten Cirebon, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon agar dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dan efektif.
2. Untuk Pemerintah, diharapkan untuk meningkatkan koordinasi antar jenjang pemerintah agar proses pendataan, verifikasi, validasi berjalan dengan baik. Pemerintah diharapkan agar meningkatkan jumlah penerima bantuan, agar lebih banyak masyarakat yang terbantu dan lebih sejahtera.
3. Kepada masyarakat, khususnya penerima bantuan agar dapat menggunakan bantuan sebagaimana mestinya, jangan bergantung pada bantuan yang disalurkan pemerintah, tetap semangat berusaha agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

